

Tanggapan balik buat Rizal Mallarangeng

Kapitalisme dan Kebudayaan

Ariel Heryanto

BERSAMA Rizal (*Bernas*, 6/8/91), saya ingin mengajukan tambahan dan kritik pada tulisan saya sendiri yang terdahulu (*Bernas*, 30/6/91) tentang kaitan kapitalisme dan kebudayaan.

Salah satu kekurangan besar dalam tulisan saya terdahulu ialah dialektika. Kapitalisme memiliki kontradiksi internal yang penting. Rizal telah menunjukkan hal ini, tapi rasanya masih perlu ditambahkan lagi.

Progresivitas kapitalisme

Semua kajian klasik dari awal abad ini mengakui kapitalisme merupakan kekuatan penggerak sejarah yang progresif. Biar pun kapitalisme diumpat, kehadiran-

Bagian terakhir dari dua tulisan

nya tak sepenuhnya disesali pengumpatnya. Kaum Marxis, misalnya, bukan menyesalkan kedatangan kapitalisme sebagai tahapan sejarah, tapi mengharap tahapan itu segera berlalu. Kapitalisme dianggap atau tepatnya diharapkan sebagai batu loncatan menuju sosialisme.

Sementara banyak pokok kajian dari khasanah klasik itu dikritik dan ditinggalkan orang, sifat progresivitas kapitalisme masih layak dipertimbangkan. Juga dalam kaitan dengan pembahasan kebudayaan yang tak mendapat tempat dalam khasanah klasik.

Hal ini perlu ditekankan karena sikap kolot atau konser-

vatisme yang melanda kesenian mutakhir Indonesia. Ini terungkap dari banyaknya ratapan kolektif para seniman dan pengamat kesenian atas apa yang disebut komersialisasi kesenian. Banyak, mungkin kebanyakan, pihak beranggapan nilai komersial secara hakiki bertentangan dengan nilai estetika.

Di harian *Bernas* sikap konservatif ini masih terus menerus bergema. Bulan lalu wartawan koran ini menghimpun sejumlah komentar dari para tokoh tentang peran pusat kesenian. Kecuali teaterawan Butet, hampir semua pandangan yang tertampung mencerminkan sikap konservatisme. Karena komersitas dan estetika dianggap secara hakiki bermusuhan, maka muncul saran agar ada dua lembaga yang berbeda untuk merukunkan keduanya: pusat kesenian dan pasar kesenian. Ini kan pemecahan khas Orde Baru yang menekankan stabilitas, keamanan dan korporatisme.

Dengan latar-belakang ini kita layak lebih menghargai sikap progresif yang dinyatakan Christianto Wibisono di Solo dan menjadi pemicu tulisan saya terdahulu (*Bernas*, 30/6/91). Atau juga berbagai tulisan Rizal Mallarangeng.

Saya yakin Rizal atau Christianto lebih mahir daripada saya untuk menunjukkan keunggulan Amerika Serikat (AS) sebagai biang kapitalis dunia abad ini dalam bidang kesenian. Terma-

suk seni hiburan massal seperti musik pop dan film yang membanjiri Indonesia di masa Orde Baru ini. Juga di Yogyakarta. Sampai-sampai seorang aktivis bernama Yayan Sopyan tak habis-habisnya mengagumi film-film AS yang baru ditontonnya sambil meratapi realitas sosial di sekelilingnya yang tidak seindah fantasi yang digambarkan film-film AS itu.

Para seniman dan pengamat seni Indonesia perlu mendengar dari Rizal atau Christianto bagaimana film dan musik yang bagus bisa diproduksi oleh proses kompetisi dan komersialisasi kapitalistik seperti di AS. Kualitas estetika tidak dengan sendirinya dan tidak secara hakiki bertentangan dengan kapitalisme atau pun komersialisasi.

Penjelasan baku di Indonesia mengenai rendahnya kualitas film Indonesia ialah dominasi nilai komersial dalam proses produksi. Jika komersialisme ini dapat diterjemahkan sebagai kapitalisme, maka saya berpendapat justru sebaliknya: kita tak menikmati film nasional bermutu karena kurangnya persaingan pasar ala kapitalisme yang terbuka. Film-film yang bagus dari AS tidak dibikin dengan niat utama mencapai nilai estetika tinggi, tetapi laba sebesar-besarnya! Laba yang besar tidak bertabrakan dengan nilai estetika tinggi bilamana ada permintaan di pasar untuk itu. Permintaan seperti itu di Indonesia sudah jelas ada, walau besarnya belum jelas.

Langka atau absennya film bagus di Indonesia bukan kare-

na komersialisasi. Bukan karena sinematek dan artis kita tak mampu. Film kita (juga pers kita) tidak diproduksi berdasarkan hukum pasar secara murni, tetapi hukum "politik adalah panglima", khususnya politik stabilitas dan keamanan.

AS dan Indonesia sama-sama merupakan masyarakat kapitalistik. Tapi dari gambaran sedikit ini sudah kelihatan beda satu masyarakat kapitalistik dengan masyarakat kapitalistik yang lain. Perbincangan tentang kapitalisme secara abstrak memang perlu, tapi tak cukup untuk memahami realitas konkret.

Tidak semua hal boleh diperjualbelikan di AS, tapi jelas jauh lebih banyak daripada di Indonesia. Buku "Marxisme" (musuh bebuyutan AS) dijadikan barang dagangan di AS. Dijual berdampingan dengan kitab suci agama dan majalah pornografi. Jika bahan P4 dicari-cari orang AS, pasti juga diijakan seperti batik atau *botdog* di pasar-pasar mereka.

Dari siapa, untuk siapa

Kita tak bisa berhenti di sini tanpa menjadi juru kampanye kapitalisme. Kita tak cukup melihat sifat progresif dalam kapitalisme. Kita perlu mempertanyakan progresi yang dicapai kapitalisme itu bersumber dari mana? Menguntungkan dan dinikmati oleh siapa saja? Lewat proses seperti apa?

Kita mengenal dan mengagumi berbagai karya budaya dari abad-abad pra-kapitalisme yang lampau: kuil, candi, istana, arca, karya sastra, perhiasan, piramida, lukisan. Siapa yang membi-

kin semua itu? Mengapa mereka membikin semua itu? Dengan sukarela dan gembira atau dengan paksaan dan siksa? Untuk siapa? Demi apa?

Tanpa mempertanyakan hal-hal ini kita mudah terbuai khayalan dan harapan menjadi masyarakat seperti AS. Maukah kita? Mungkinkah? Angan-angan seperti itu melatar-belakangi berbagai teori dan program pembangunan dunia ketiga setengah abad yang lampau. Dua dekade yang lalu semua angan-angan itu sudah dicampakkan, terutama oleh teori ketergantungan dan sistem dunia.

AS bisa menjadi negara yang kuat dan makmur, bukan karena kapitalismenya tetapi berkat kelemahan dan kemiskinan berbagai negeri di dunia ketiga yang dihisapnya. AS berkepentingan untuk melestarikan peperangan dan kemiskinan di berbagai wilayah lain demi menjaga stabilitas, kesejahteraan dan kemewahan etalase demokrasi yang diberikan kepada rakyatnya.

Rizal jauh lebih tahu daripada saya tentang semua ini. Karena itu aneh jika ia percaya bahwa "dalam kebudayaan ini, orang kecil juga bisa sukses." Tak kalah mengherankan ialah keyakinannya bahwa "kapitalisme dan demokrasi sebenarnya berada dalam posisi simbiose mutualisme." Kecuali jika kita sedang berbicara tentang demokrasi borjuasi. Semangat demokrasi macam apa yang diperagakan AS secara brutal dari satu perang ke perang di negara orang lain? Kita ingin mende-

ngar dari seorang seperti Rizal yang secara langsung menyaksikan Perang Teluk.

Rizal benar, keserakahan kapitalistik selama ini bisa ditahan demi tertundanya kehanjuran sistem itu sendiri. Persoalannya, yang perlu dijelaskan oleh Rizal, apakah pihak yang dihambat itu suka, menerima saja, dan tidak akan melawan? Apakah negara yang mencoba melestarikan kepincangan sosial dengan menahan keserakahan pemilik modal akan selalu cukup kuat membendung bukan saja agresi kapitalis tetapi gerak sejarah?

Ideal dan material

Banyak pokok lain dari tulisan Rizal yang perlu ditanggapi. Sayangnya ruang ini sangat terbatas. Hanya satu pokok dari tulisannya yang perlu dibahas di sini.

Dalam bagian utama tulisannya, Rizal memisahkan dan membedakan nilai kerja produktif seorang seniman dalam berkarya dan pemasaran karya seni itu. Katanya, "dalam proses mencipta, seorang seniman harus mempersetankan apakah ia nantinya akan memperoleh sejuta rupiah atau hanya sekadar tepuk tangan." Ini dibedakan oleh Rizal dari apresiasi dan konsumsi karya seni yang bisa dibeli dengan uang.

Saya tidak sependapat dengan pandangan apa pun yang mengandalkan sikap normatif "seharusnya" begini atau begitu. Lalu memvonis realita empirik yang tak cocok dengan norma itu: "puisi yang digubah ... untuk meraih uang atau pangkat sejak awal sebenarnya telah ditakdirkan menjadi pamflet, propaganda, iklan, kalau bukan sekadar sampah." Apa dasar penilaian begini?

Rizal juga salah kutip. Saya pernah memberikan deskripsi historis "ada bidang-bidang kehidupan yang didasari, berpusat, atau berpuncak pada nilai-

nilai non-material". Tapi saya tak menilai bahwa selayaknya semua itu begitu.

Di atas telah saya tunjukkan bahwa uang dalam kompetisi pasar karya seni di negeri seperti AS bisa menghasilkan karya-karya yang sangat bermutu. Tidak selalu sampah. Bisa lebih bermutu daripada karya-karya yang dihasilkan dengan norma idealis di berbagai negeri sosialis. Di sini kelihatan kontradiksi sikap Rizal terhadap kapitalisme. Sikap romantik konservatif yang melanda para seniman kita agaknya menulari Rizal yang progresif.

Dalam satu hal yang sangat mendasar, kerja seniman tak berbeda dari kerja tukang kayu, koki di warung, hakim di pengadilan atau editor di kantor redaksi. Semuanya tidak bekerja di luar sejarah, walau bekerja individual. Tak di luar planet atau ruang hampa. Semuanya boleh mempersetankan uang, tapi kondisi kesejarahan tidak bakal mempersetankan mereka dan tak memberikan kebebasan kerja seluas yang dibayangkan Rizal. Alat kerja, hambatan kerja, bahkan fantasi dan imajinasi paling liar yang mereka jadikan ilham merupakan produk dari kondisi zamannya. Kondisi kapitalisme merupakan sebuah contohnya.

Kita bisa mempersetankan apakah tulisan kita yang akan diterbitkan koran akan dihargai dengan uang dan berapa nilainya. Tapi kita tak bisa mempersetankan norma dan kaidah kelayakan terbit yang membatasi isi tulisan kita. Batasan ini bila dilacak berasal dari keterbatasan hakekat koran sebagai barang dagangan. Ide tak berkembang bebas dari kondisi material. Juga ide seniman.***

*) Penulis adalah kandidat PhD pada Monash University, Australia, dan dosen Fakultas Pasca Sarjana UKSW, Salatiga.